

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Polisi sebagai sebuah institusi hukum menjadi tumpuan masyarakat dalam mendapatkan kebijakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi institusi penegak hukum, kepolisian juga sebagai abdi masyarakat yang bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat. Sebagaimana dilansir pada situs resmi Polisi Republik Indonesia, “Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat”. Prinsip ini searah dengan filosofi baru polisi modern yang dianut dan diimani oleh polisi di seluruh negara yaitu, “*Vigilant Quiescant*”. Filosofi ini bermakna bahwa polisi selalu siaga dan berjaga sepanjang waktu agar masyarakat dapat merasakan rasa aman dan tentram.

Dengan idealisme visi dan misi tersebut, tentunya polisi diharapkan dapat menjadi sosok yang bisa dipercaya oleh masyarakat baik secara profesional sebagai seorang ujung tombak terdepan dalam penegakan hukum, maupun sebagai individu yang mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan sosial di masyarakat, seringkali polisi malah dilihat sebagai sosok yang menyeramkan bahkan menjadi momok yang menakutkan.

Di Indonesia sendiri, satuan polisi terbesar disebut dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan berpusat di Markas Besar Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Mabes Polri) yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.32, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada keseharian menjalani pokok tugasnya, Polri memegang visi untuk mewujudkan Indonesia yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Selain visi tersebut, Polri juga menggendong misi yang bertujuan sebagai jalan untuk mencapai visinya, misi tersebut adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Tolan et.al (2017) memperlihatkan nilai-nilai moral pada anggota Kepolisian Indonesia yang luntur dan cenderung bercitra miring di mata masyarakat. Polisi tidak lagi dilihat sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang berwibawa, tetapi lebih kepada individu menyeramkan yang keras dan kaku serta siap menindak tanpa ampun pelaku yang dianggap melanggar hukum, bahkan dianggap sebagai alat pukul penguasa yang senang dengan tindakan-tindakan represif. Selain sosok yang menyeramkan, perilaku polisi juga sering dilihat tidak sesuai dengan tuntunan moral masyarakat. Seperti sering terlihat melakukan kegiatan perjudian hingga mabuk-mabukan. Profesionalitas anggota kepolisian juga menjadi garis bawah yang diperhatikan oleh masyarakat.

Proses administratif yang acap kali berbelit-belit hingga pungutan liar sebagai pelancar urusan menjadi bagian dari rahasia umum di masyarakat.

Selain dari realita yang diperhatikan langsung oleh masyarakat, media juga turut membangun citra polisi di masyarakat. Junior (2023) meneliti Koran Tempo Online dan mendapatkan pemberitaan miring dan wacana negatif yang dibangun oleh Koran Tempo Online dalam mengkonstruksi berita yang ditayangkan. Berita yang diteliti adalah artikel berita yang terbit pada 15 Oktober 2022 tentang kasus skandal narkoba oleh salah satu aparat kepolisian, Teddy Minahasa. Dalam artikel tersebut polisi digambarkan tidak netral dalam melakukan penyelidikan pada kasus yang melibatkan anggota institusi. Polisi juga dianggap gagal dalam melakukan tugasnya sebagai institusi penegak hukum melalui representasi skandal yang melibatkan perwira tinggi polisi.

Pada 22 hingga 26 Agustus 2024 lalu terjadi aksi demonstrasi dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum ikut meramaikan aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Aksi ini dilatarbelakangi oleh tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang merancang undang-undang secara ugal-ugalan serta dianggap melangkahi konstitusi dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi demonstrasi ini kemudian diperingati sebagai “Peringatan Darurat” yang mengacu pada peringatan terhadap darurat demokrasi dan konstitusi yang dilangkahi oleh lembaga legislasi, DPR RI.

Kronologi masalah ini bermula pada dua putusan yang telah dibuat oleh MK, keputusan pertama, MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, membolehkan partai politik mana pun mengajukan calonnya sendiri pada Pemilu, bahkan yang tidak memiliki kursi di DPRD. Kemudian keputusan kedua yang dibuat MK tercantum pada putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengatur usia pencalonan kepala daerah dihitung pada saat diangkat sebagai calon kepala/wakil kepala daerah, bukan pada saat pengangkatan menjadi kepala/wakil kepala daerah. Berseberangan dengan itu, DPR membuat RUU yang merevisi UU Pilkada sebelumnya. Dalam revisinya, DPR mencanangkan dua poin revisi, yakni pertama, aturan yang memperbolehkan partai yang tidak memiliki kursi untuk mencalonkan calon daerah teratas hanya berlaku bagi partai di luar parlemen. Kedua, batasan usia kepala daerah mengacu pada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang dihitung sejak pengangkatan, dan bukan keputusan MK yang telah dibuat sebelumnya. RUU ini dianggap sangat bertentangan dan DPR dianggap men-*abuse* kekuatan yang dimiliki dan melangkahi MK dalam pembuatan rancangan revisi UU serta mengakali konstitusi. Hingga akhirnya masyarakat merasa tidak puas dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada tersebut yang rencananya pengesahaan tersebut dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, namun dibatalkan karena adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat umum.

Aksi demonstrasi ini bermula dari seruan “Peringatan Darurat” di sosial media. Banyak *influencer*, media digital, dan tokoh publik yang membuat postingan “Peringatan Darurat” yang mengangkat tentang isu rencana kontroversial DPR

dalam merevisi UU Pilkada yang terkesan mengakali konstitusi dan melangkahi kewenangannya sebagai lembaga legislatif. Seruan “Peringatan Darurat” ini juga memuat ajakan aksi demonstrasi serentak di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada 22 Agustus 2024 dan berpusat di Gedung DPR, Jakarta. Demonstrasi ini menuntut pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada 2024. Pada 22 Agustus aksi demonstrasi tersebut terealisasi. Ribuan mahasiswa, masyarakat hingga artis dan publik figur turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan tersebut. Pengesahan RUU yang seharusnya dilakukan hari itu pun harus ditunda karena peserta rapat yang hadir kurang dari jumlah kuorum untuk mengesahkan RUU. Peningkatan tensi demonstrasi terus terjadi di daerah-daerah yang menggaungkan tuntutan yang sama. Hingga akhirnya karena tekanan publik dan gelombang demonstrasi yang semakin membesar, pengesahan RUU tersebut dibatalkan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana Pilkada menetapkan untuk menggunakan keputusan MK dalam Peraturan KPU (PKPU)

Aksi demonstrasi yang merupakan tindakan menyuarakan pendapat adalah hak dari warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 09 tahun 1998 pada Bab 1 Pasal Pertama yang berbunyi “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku”. Sehingga tindakan yang mengganggu kegiatan pemenuhan hak ini merupakan tindakan yang melanggar Undang-undang. Sayangnya polisi sebagai penegak hukum yang seharusnya menciptakan ketertiban malah menjadi pelanggar hak warga negara

dengan melakukan tindakan intimidasi hingga agresi terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi.

Selama aksi pada 22-23 Agustus yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat ini, tindakan polisi menjadi sorotan yang tidak dapat diabaikan. Aparat kepolisian banyak diliput oleh media dengan narasi yang bisa dikatakan penuh dengan agresi. Amnesty International Indonesia (AII) dalam liputan yang diterbitkan CNN Indonesia (2024) mengungkapkan bahwa aparat polisi menggunakan kekerasan dan tindakan represif yang berlebihan terhadap para demonstran. AII bahkan menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai tindakan agresif yang brutal. AII berpendapat bahwa tindakan brutal yang dilakukan oleh kepolisian ini merupakan bukti dari gagalnya kesadaran dari aparat pada hak masyarakat dalam berunjuk rasa, menggugat, dan juga beroposisi yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Selain kekerasan yang aparat lakukan kepada masyarakat umum, agresi kepolisian juga menyerang para jurnalis yang haknya dilindungi secara hukum sebagai insan pers. Komite Keselamatan Jurnalis melalui Amnesty.id (2024) mengungkap tindakan yang dilakukan aparat terhadap para jurnalis yang melakukan liputan pada gerakan demonstrasi “Peringatan Darurat”. KKJ mengungkapkan setidaknya ada 11 jurnalis yang mendapatkan tindakan kekerasan secara psikis, fisik, hingga ancaman pembunuhan dari aparat keamanan pada aksi demonstrasi itu. Menyusul serangkaian kejadian tersebut, KKJ menilai hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap jaminan perlindungan kegiatan jurnalistik berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kekerasan yang

dilakukan kepada jurnalis hingga mengakibatkan luka yang berat juga dapat dikenai Pasal 351 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Media massa menjadi sangat kuat dampaknya dalam membentuk opini masyarakat (Sudrajat & Rohida dalam Suprayitno & Widiastuti, 2023). Sari (2020) mengungkapkan media mampu membentuk dan membangun opini masyarakat melalui wacana yang dihadirkan di dalam sebuah teks berita. Ditambah dengan perkembangan teknologi internet yang membuat media massa bertransformasi menjadi berbasis daring yang berimbas percepatan penyebaran informasi di masyarakat karena mudah dan luasnya akses terhadap berita (Sari, 2020). Berita online juga menjadi pilihan yang lebih digemari oleh masyarakat muda. Hal ini dikaji oleh Dame Laoera & Wibowo (2023) yang menyimpulkan bahwa generasi muda menyukai kemudahan dan kenyamanan akses yang diberikan oleh media digital dibanding dengan media konvensional. Selain itu, beragamnya tayangan multimedia yang dapat ditampilkan dalam berita yang dimuat pada media digital juga menjadi alasan mengapa media digital diminati oleh masyarakat saat ini.

BBC sebagai media internasional yang memiliki media cabang di Indonesia turut menyoroti tindakan yang dilakukan oleh polisi pada aksi demonstrasi tersebut. Pada beritanya, BBC memuat dua berita khusus yang menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Berita tersebut bertajuk “Kesaksian keluarga demonstran tolak RUU Pilkada yang jadi korban kekerasan aparat - 'Anak saya melawan ketidakadilan, kenapa diperlakukan seperti binatang?’” (BBC Indonesia, 2024b), yang terbit pada 23 Agustus 2024. Berita tersebut meliput brutalitas dari

tindakan kepolisian pada aksi demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada 2024 terhadap para demonstran yang mayoritas adalah mahasiswa. BBC meliput beberapa korban yang terluka parah akibat tindakan aparat hingga korban harus dibawa ke rumah sakit dan dirawat secara intensif. BBC melalui kesaksian pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) juga mengungkapkan tindakan represif dan berlebihan dari kepolisian. Mulai dari penembakan gas air mata secara tidak terukur, penghalangan tugas pers, hingga pemukulan secara sewenang-wenang oleh aparat.

Selain berita tersebut, BBC juga membuat liputan khusus yang merangkum kompilasi kesaksian korban dan keluarga korban dari tindakan represif aparat pada aksi demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada 2024 dengan judul “Repetisi ‘Brutalitas Polisi’ Dalam Demonstrasi Revisi UU Pilkada, Mengapa Terus Berulang?” (BBC Indonesia, 2024). Pada berita tersebut kesaksian dirangkum dari berbagai lapisan masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi tersebut, mulai dari mahasiswa yang menjadi mayoritas peserta aksi, jurnalis dan wartawan yang meliput aksi demonstrasi, hingga anggota pendamping hukum yang bertugas untuk mendampingi para peserta demonstrasi dalam memenuhi hak berpendapatnya. Dari liputan tersebut terungkap berbagai kekerasan yang dilakukan kepolisian secara brutal dan tidak pandang bulu terhadap masyarakat, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat sama sekali dalam aksi demonstrasi tersebut. BBC juga menyoroti tindakan brutalitas ini yang selalu terulang pada setiap kegiatan demonstrasi yang dialibikan sebagai tindakan penertiban yang diperlukan oleh aparat.

BBC tidak hanya kali ini menyoroti isu-isu “miring” pada instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada 2022, BBC membuat dua berita tentang pihak kepolisian yang melakukan tindakan rekayasa kasus dengan merekayasa pelaku dan memaksa mereka untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Berita tersebut berjudul “Kisah Korban Rekayasa Kasus Polisi: ‘Enggak Ngaku Begal, Saya Ditembak. Padahal Saya Enggak Ngelakuin’” (BBC, 03/11/2022) dan “‘Klitih’ di Yogyakarta: ‘Mata Saya Dilakban Dan Dipukul’ - Terdakwa Alami Kekerasan agar Mengaku, Rekayasa Kasus Membuat Citra Polisi Kian ‘Terpuruk’” (BBC, 08/11/2022). Tindakan pemaksaan ini juga diiringi dengan tindakan kekerasan hingga menyebabkan luka berat. Selain itu, tindakan intimidasi dengan ancaman pembunuhan juga dilakukan oleh oknum kepolisian yang menciptakan luka trauma bagi korban.

Di tahun 2023 BBC melakukan pelaporan terhadap temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras) dalam liputannya yang berjudul “Ironis Anggota Polisi yang Seharusnya Memberi Rasa Aman Justru Jadi Pelaku Kekerasan’ – Kontras Temukan 622 Kasus Kekerasan oleh Polisi Setahun Terakhir” (BBC Indonesia, 2023), liputan ini menyimpulkan adanya budaya kekerasan di institusi Polri yang mengakibatkan tindakan kekerasan terhadap masyarakat terus berulang. Selain itu pada tahun tersebut BBC juga melakukan liputan terhadap Kepolisian pada kasus KDRT yang menyebabkan terbunuhnya 4 orang anak oleh ayahnya sendiri. Pada liputan yang berjudul “ Kasus Pembunuhan Empat Anak di Jagakarsa: Polisi Dituduh Lamban dan Mengabaikan Kasus-Kasus KDRT” (BBC Indonesia, 2023), BBC menyoroti

kelalaian kepolisian dalam penanganan kasus KDRT hingga menyebabkan melayangnya nyawa.

Pada tahun 2024, selain meliput kasus kekerasan aparat pada demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada 2024 lalu, BBC juga meliput kejanggalan pada penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eky beberapa tahun lalu. Kejanggalan pada penyelidikan ini meliputi penangkapan tiga pelaku buron yang “molor” selama bertahun-tahun, adanya indikasi hingga dugaan “salah tangkap”. Liputan ini dirangkum dalam sebuah artikel berita berjudul “Kasus Vina dan Tuduhan Kejanggalan di Balik Penyelidikan Polisi - Polisi Hapus Dua Nama DPO Usai Penangkapan Terduga Pelaku” (BBC Indonesia, 2024a).

Perhatian BBC terhadap isu-isu kepolisian yang menyalahi hak asasi manusia ini didasari oleh perhatian lebih dari BBC secara global terhadap isu-isu yang “bernuansa” konflik Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini karena BBC dalam pelaporan beritanya menganut unsur atau prinsip-prinsip *Human Right Journalism* (HRJ) yang berfokus pada pengungkapan kebenaran dan mengangkat perhatian terhadap urgensi dari pemenuhan HAM (Shaw & Selvarajah, 2019). Selain itu, BBC juga kerap kali mengambil posisi atau keberpihakan terhadap orang-orang yang dimarjinalkan atau yang terpinggirkan dalam peliputan beritanya (Shaw & Selvarajah, 2019). Sehingga di dalamnya akan sering terlihat berita-berita konflik HAM yang akan diliput melalui kacamata korban ataupun pihak yang lebih lemah. Walaupun begitu, kredibilitas data yang dipaparkan dalam laporan BBC dapat

dipertanggungjawabkan karena BBC selalu melibatkan ahli yang selaras dengan konteks isu yang dibahas dalam laporannya (Shaw & Selvarajah, 2019).

BBC sebagai media yang bertaraf internasional selalu berusaha menjaga independensinya dalam menyiarkan berita. Ketidakberpihakannya pada aspek politik dan kenegaraan bahkan di tengah konflik multinasional menjadi sebuah identitas unik yang dimiliki oleh BBC dan dicitrakan kepada masyarakat (Dupéré, 2020). Independensi ini mengalirkan kepercayaan dan visi BBC pada kemerdekaan berpendapat dan menciptakan kepercayaan publik terhadap informasi dan berita yang disajikan. Selain kenetralannya pada aspek politik kenegaraan, BBC juga menjaga komitmennya untuk mementingkan kepentingan publik daripada kepentingan komersial sebagai dedikasi terhadap pelayanan kepada publik. Hal ini dikarenakan model pembiayaan yang digunakan oleh BBC melalui biaya lisensi yang memungkinkan BBC untuk membangun jurnalisme yang lepas dari tunggangan dan kebebasan editorial dalam memberitakan berita yang berkualitas (Seaton, 2020). Selain itu, kecepatan dan kelincahan BBC dalam menghadapi dan menanggapi isu di masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang membuat BBC terus relevan dan dipercaya publik. Dengan komitmen dan konsistensi BBC dalam menjaga kepercayaan publik dan keindepenan berita, tidak ayal bila BBC dapat dikatakan sebagai media mainstream yang kredibel, transparan, dan berimbang dalam memberitakan sebuah informasi.

Namun media sebagai sarana penyampaian informasi tidak terlepas dari agenda konstruksi tujuan tertentu yang ingin dibangun. Fowler dalam Lenora et al.

(2023) mengungkapkan bahwa media dalam beritanya tidak semata-merta menggambarkan atau merepresentasikan realita yang nyata apa adanya, melainkan membangun persepsi melalui sederet proses seleksi dan penyaringan informasi untuk kemudian menciptakan refleksi realita yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai pembaca. Menurut Roger Fowler, wacana adalah suatu jenis komunikasi lisan atau tertulis ditinjau dari nilai, keyakinan, dan kategori. Dalam hal ini, keyakinan mewakili ekspresi perspektif, organisasi, atau pengalaman dunia (Rahman & Hamdani, 2023). Wacana merupakan tindakan komunikasi aktual yang mencakup keterlibatan linguistik dalam pembentukan makna. Wacana bagi Fowler tidak hanya sekedar pemilihan kata dalam teks, tetapi juga susunan kata, cara penyampaian, dan konteks yang ada di baliknya (Konkov et al., 2016) Di dalam wacana terkandung ideologi dan kekuatan kuasa tertentu, hal ini menjadi sesuatu yang penting diperhatikan dalam analisis karena akan melihat pihak mana yang memiliki kekuatan dominan dan minoritas (Rahman & Hamdani, 2023).

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis (AWK). Analisis wacana kritis sendiri merupakan sebuah metode yang digunakan dalam mengungkap wacana dalam sebuah teks. Haryatmoko (2022) mendefinisikan AWK sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menguak ideologi dalam sebuah teks dan melihat peran kekuasaan di baliknya dalam membentuk ideologi tersebut. Dalam prosesnya, AWK memerlukan dua aspek penitng agar dapat memaknai bahasa dan melihat hubungan antara kekuasaan dan hubungannya dengan konteks sosial. Aspek pertama yaitu proses kreasi sebuah makna dengan melihat konteks sosial-politik khusus. Kemudia yang kedua adalah melihat keterlibatan dan motif kreator-

kreator pembuat teks dalam pembuatan ideologi atau wacana yang dimuat dalam sebuah teks. Dengan begitu metode ini cocok dalam rangka untuk menguak wacana yang ada di dalam teks berita yang dipublikasi oleh BBC Indonesia.

Dari Berbagai model AWK yang ada, peneliti memilih model AWK milik Norman Fairclough yang mengungkap wacana dalam triangulasi yang terdiri dari dimensi teks, dimensi praktis diskursi, dan dimensi praktik sosial budaya. Model ini dipilih karena menguak wacana tidak hanya melalui aspek kebahasaan sebuah teks, tapi juga melalui latar belakang kreator teks dan konteks sosial yang ada di masyarakat (Riyanti, 2023). Selain itu, model triangulasi milik Fairclough juga merupakan model yang paling sistematis dalam menguak wacana yang tertanam dalam sebuah teks dan telah melewati proses pengembangan yang baik (Xing, 2024). Dengan begitu, metode ini menjadi alat penting yang relevan dalam menguak wacana dalam penelitian ini.

Dari proses ini kemudian menjadi sebuah “kecurigaan” dan menumbuhkan keingintahuan penulis untuk melihat bagaimana sebuah wacana yang dikonstruksi dalam berita oleh media terutama BBC sebagai sebuah media internasional yang telah menjamur pengaruhnya di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini kemudian muncul sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan tersebut. Spesifikasi penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana representasi citra Polisi Negara Indonesia pada artikel berita BBC Indonesia saat aksi demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada 2024 melalui analisis wacana kritis model Norman Fairclough, sehingga penelitian ini kemudian diberi judul “Analisis

Wacana Kritis Citra Polri pada Demonstrasi Penolakan Revisi UU Pilkada 2024 di [bbc.com/indonesia](https://www.bbc.com/indonesia)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah yang akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini, yaitu “Bagaimana wacana citra Kepolisian Republik Indonesia pada Demostrasi Tolak Revisi UU Pilkada 2024 di artikel berita oleh BBC Indonesia?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguak wacana yang dibangun oleh portal berita online BBC Indonesia terhadap citra Kepolisian Republik Indonesia pada aksi demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada 2024 menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian diharapkan mampu berkontribusi pada perkembangan studi Ilmu Komunikasi terutama pada kajian terhadap jurnalistik dan pemberitaan pada media massa online terlebih untuk melihat konstruksi wacana pada media dengan menggunakan pendekatan model analisis wacana kritis Norman Fairclough. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian-penelitian media online dan jurnalistik yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis sebagai referensi bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam melihat wacana yang dibangun oleh media terhadap institusinya. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam melihat bagaimana wacana dibangun oleh media dalam konten beritanya.

